

**PENTINGNYA REKONSILIASI DALAM PEMERIKSAAN PAJAK
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
STUDI KASUS PT. X DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURABAYA TEGALSARI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH :

S A N T I

NIM : 049822005-E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

SKRIPSI

**PENTINGNYA REKONSILIASI DALAM PEMERIKSAAN PAJAK
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
STUDI KASUS PT. X DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURABAYA TEGALSARI**

DIAJUKAN OLEH :

S A N T I
NIM : 049822005 – E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

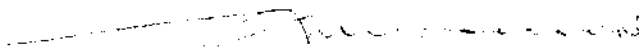
DOSEN PEMBIMBING,



Drs. HERU TJARAKA, M.Si.,Ak
NIP. 132054304

Tanggal : 7-11-2001

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. ARSONO LAKSMANA, SE.,Ak
NIP. 130783542

Tanggal :

ABSTRAKSI

Pajak adalah primadona sumber penerimaan dalam negeri yang mempunyai peranan penting untuk membiayai kegiatan pembangunan. Kontribusi pajak yang cukup besar tersebut perlu didukung oleh sistem perpajakan yang memadai.

Indonesia saat ini menerapkan sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Keberhasilan sistem self assessment juga ditentukan oleh tindakan penegakan hukum yang diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Salah satu teknik dalam pemeriksaan pajak adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti mencocokkan dua sumber terpisah mengenai hal yang sama, dan kalau ada perbedaan, maka perbedaan itu harus dapat dijelaskan. Yang perlu dilakukan rekonsiliasi dalam pemeriksaan pajak yaitu peredaran usaha PPh dengan penyerahan PPN serta unsur biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan obyek pajak dalam SPT PPh Pasal 21.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun perusahaan (PT. X) telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau ternyata substansi menunjukkan lain atau motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan (adanya *tax evasion*), administrasi pajak (fiskus) dapat menganggap bahwa Wajib Pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.